



*Ringkasan Laporan*  
**Perempuan Pekerja Informal  
Dalam Ekonomi Digital**

Studi Future of Work

Mei 2024

# Daftar isi

*Dapatkan laporan lengkap dalam Bahasa Inggris di tautan ini.*

## Temuan kunci dan rekomendasi

01 Rangkuman eksekutif 5

02 Rekomendasi dan peluang 6

## Hasil studi

03 Pengalaman pekerja perempuan di sektor informal 13

04 Akses dan penggunaan layanan keuangan digital (DFS) di kalangan pekerja perempuan informal 17

05 Norma sosial dan tugas perawatan yang memengaruhi pekerja perempuan di ekonomi informal 19

06 Akses ke pengembangan bisnis dan pelatihan keterampilan 21

05 Perlindungan sosial dan persatuan pekerja 22

07 Sampel dan metodologi 25

# Glossarium

<b>BLK</b>	Balai Latihan Kerja
<b>BPD</b>	Bank Pembangunan Daerah
<b>BP Jamsostek</b>	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
<b>BPJS TK</b>	BPJS Ketenagakerjaan
<b>DP</b>	<i>Down Payment</i>
<b>ILO</b>	International Labor Organization
<b>JHT</b>	Jaminan Hari Tua
<b>Kemenaker</b>	Kementerian Ketenagakerjaan
<b>Kemendikbud</b>	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
<b>Kemenko Ekonomi</b>	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
<b>Kemenkes</b>	Kementerian Kesehatan

<b>Kemenkeu</b>	Kementerian Keuangan
<b>Kemenperin</b>	Kementerian Perindustrian
<b>KemenPPPA</b>	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Kemensos</b>	Kementerian Sosial
<b>Kominfo</b>	Kementerian Komunikasi dan Informatika
<b>LKD</b>	Layanan Keuangan Digital
<b>LSM</b>	Lembaga Swadaya Masyarakat
<b>PAUD</b>	Pendidikan Anak Usia Dini
<b>PDB</b>	Produk Domestik Bruto
<b>THT</b>	Tabungan Hari Tua
<b>TPA</b>	Taman Penitipan Anak



## Temuan kunci dan rekomendasi



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA



# Rangkuman eksekutif

- MSC bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk melakukan studi terkait perempuan dalam ekonomi digital. Tujuan studi adalah untuk menganalisis akses kerja bagi pekerja informal perempuan dalam ekonomi digital. Studi dilatarbelakangi oleh tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang berada pada kisaran 50% untuk 20 tahun terakhir, jauh di bawah partisipasi laki-laki yang sebesar 80%.
- Meskipun jumlah pekerja perempuan lebih rendah daripada laki-laki, pekerja perempuan lebih besar kemungkinannya untuk menjadi pekerja informal. Sekitar 66% atau 54.5 juta pekerja informal di Indonesia adalah perempuan.
- Studi terdiri dari lima bagian yang berupaya untuk menangkap pengalaman perempuan dalam pekerjaan informal dan mencari tahu bagaimana ekonomi digital mengubah cara mereka bekerja:



**01**  
Pengalaman  
pekerja perempuan  
di sektor informal



**02**  
Akses dan  
penggunaan  
LKD di kalangan  
pekerja  
informal



**03**  
Norma sosial dan  
tugas perawatan  
yang memengaruhi  
pekerja informal  
perempuan



**04**  
Akses ke  
pengembangan  
bisnis dan pelatihan  
keterampilan bagi  
pekerja informal  
perempuan



**05**  
Perlindungan sosial  
dan penyediaan  
layanan  
pengasuhan anak  
bagi pekerja  
informal

# Rekomendasi dan peluang



Temuan 	Perubahan apa yang diperlukan? 	Aktor 	Kategori dan dampak 	Prioritas 
<p>Perempuan dalam angkatan kerja informal lebih banyak yang memiliki akun bank dan menggunakan m-banking serta pembayaran digital daripada perempuan di luar angkatan kerja. Akan tetapi, mereka sering kali kesulitan untuk mengoperasikannya.</p> <p>Mereka yang bekerja secara daring menggunakan layanan keuangan digital lebih intensif dan teratur daripada pekerja luring.</p> <p>Pekerjaan informal dan platform digital terbukti menjadi pendorong inklusi keuangan, yang dapat membantu menutup kesenjangan gender dalam layanan keuangan.</p>	<p>Mengembangkan produk dan layanan keuangan yang mengikuti karakteristik pekerjaan informal, seperti frekuensi pembayaran harian dan ukuran usaha, untuk memastikan pemakaian layanan keuangan yang lebih luas.</p> <p>Contohnya, untuk memudahkan akses kredit bagi mitra dan merchant, <u>JULO</u> bekerja sama dengan <u>Grab</u> meluncurkan <u>Grab Modal</u> yang dapat diakses langsung melalui aplikasi Grab.</p> <p>Mempertimbangkan keberagaman perempuan di berbagai sub-segmen, termasuk faktor-faktor seperti sektor, usia atau tahapan hidup, dan norma gender setempat selama perancangan layanan keuangan.</p> <p>Misalnya, <u>Amartha</u> menargetkan usaha mikro perempuan dan menawarkan kredit melalui penilaian kredit alternatif dengan lensa gender. Amartha juga memberikan pelatihan bagi pengguna untuk menavigasi aplikasi dengan mudah.</p>	<p><b>Kemenaker dan KemenPPPA:</b> Pengembangan kebijakan, advokasi</p> <p><b>Penyedia layanan keuangan:</b> Pengembangan produk, penelitian, dan data</p> <p><b>Persatuan pekerja:</b> Sosialisasi, serikat, dan advokasi kebijakan</p>	<p>Akses keuangan</p> <p>Edukasi dan peningkatan kesadaran</p>	<p> Medium</p>

# Rekomendasi dan peluang



Temuan 	Perubahan apa yang diperlukan? 	Aktor 	Kategori dan dampak 	Prioritas 
<p><b>Pekerja usia tua</b></p> <p>Perempuan berusia 60 tahun ke atas yang bekerja penuh waktu (&gt; 40 jam per minggu) banyak yang bekerja secara luring. Hal ini menyoroti kerentanan di usia tua dan kurangnya perlindungan sosial untuk mereka.</p> <p>Pekerja usia tua yang secara informal tergabung dalam serikat dan menerima bantuan dari LSM memiliki akses dan informasi lebih baik terhadap program perlindungan sosial yang tersedia bagi mereka.</p> <p>Partisipasi sukarela dalam program pensiun BPJamsostek JHT bagi pekerja informal <u>masih rendah</u>.</p>	<p>Mempromosikan penerapan sistem pensiun sosial universal untuk meningkatkan jaminan pendapatan bagi pekerja lanjut usia. Partisipasi dapat dimaksimalkan jika hambatan administrasi dapat dikurangi.</p> <p>Misalnya, pemerintah Thailand menyediakan <u>program pensiun universal</u> bagi orang-orang di luar pekerjaan formal dalam bentuk transfer uang tunai untuk mengurangi angka kemiskinan di hari tua.</p> <p>Memfasilitasi akses terhadap tabungan dan alat perencanaan pensiun yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerja informal, dimulai sejak usia produktif.</p> <p>Contohnya, BPD Bali meluncurkan <u>Tabungan Hari Tua (THT) Bali Dwipa</u>, sebuah produk deposito pensiun terjangkau sebesar minimal IDR 50,000.</p> <p>Berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil untuk mensosialisasikan dan mendorong pendaftaran BPJamsostek Bukan Penerima Upah (BPU).</p>	<p><b>Kemenaker, KemenPPPA:</b> Pengembangan kebijakan, perlindungan sosial, akses ke sumber daya</p> <p><b>BPJamsostek:</b> Pengembangan produk, riset, dan data</p> <p><b>Organisasi masyarakat sipil:</b> Advokasi, riset, dan data</p> <p><b>Penyedia layanan keuangan:</b> Pengembangan produk, riset, dan penyediaan data</p>	<p>Edukasi dan peningkatan kesadaran</p> <p>Kerangka peraturan yang efisien</p> <p>Upaya perlindungan sosial</p> <p>Tawar-menawar kolektif</p> <p>Akses keuangan</p>	<p></p> <p><b>Tinggi</b></p>

# Rekomendasi dan peluang



Temuan 	Perubahan apa yang diperlukan? 	Aktor 	Kategori dan dampak 	Prioritas 
<p><b>Risiko siklus hidup perempuan</b></p> <p>Perempuan di sektor informal sering kali berhenti dari pekerjaannya untuk mengasuh anak setelah menikah atau melahirkan, meskipun mereka berada pada usia produktif. Mereka tidak mendapat cuti melahirkan dan tunjangan karena tidak termasuk dalam sistem perlindungan sosial.</p> <p>Cuti melahirkan berbayar di Indonesia merupakan tanggung jawab pemberi kerja. Mereka yang bekerja di sektor informal tidak mendapatkan manfaat cuti melahirkan berbayar.</p>	<p>Menjadikan cuti melahirkan dan cuti ayah berbayar tersedia secara universal melalui integrasi ke dalam sistem jaminan sosial, program iuran (misalnya BPJS TK), program bantuan sosial, atau program non iuran.</p> <p>Misalnya, program <u>Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY)</u> di India memberikan bantuan tunai bersalin bagi ibu hamil dan menyusui yang berada di luar pekerjaan formal. Hal ini mencakup pemeriksaan antenatal bagi ibu hamil dan layanan vaksinasi bagi bayi baru lahir.</p> <p>Melihat kembali studi tahun 2021 mengenai <u>metodologi penetapan biaya untuk mengevaluasi pengeluaran yang terkait dengan bantuan tunai cuti melahirkan</u> bagi perempuan Indonesia yang bekerja di sektor informal. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa hanya perlu kurang dari 0,5% PDB Indonesia untuk membiayai bantuan tunai cuti melahirkan. Perspektif ini menjadikan pengeluaran tersebut sebagai investasi pada tabungan kesehatan masyarakat dan bukan sekadar pengeluaran belanja publik.</p>	<p><b>Kemenaker, Kemenkeu, KemenPPPA, Kemenkes, dan Kemensos:</b> Pengembangan kebijakan, akses ke sumber daya, dan penganggaran</p> <p><b>BPJamsostek:</b> Pengembangan produk, penelitian, dan penyediaan data</p> <p><b>Organisasi masyarakat sipil:</b> Advokasi, penelitian, dan penyediaan data</p>	<p>Kerangka peraturan yang efisien</p> <p>Upaya perlindungan sosial</p> <p>Tawar-menawar kolektif</p>	<p></p> <p>Medium</p>

# Rekomendasi dan peluang



Temuan 	Perubahan apa yang diperlukan? 	Aktor 	Kategori dan dampak 	Prioritas 
<p>Ibu yang memiliki akses terhadap fasilitas penitipan anak yang terjangkau dan terpercaya, cenderung mempunyai jam kerja yang lebih lama.</p> <p>Masih ada stigma negatif di masyarakat terkait menitipkan anak di Tempat Penitipan Anak (TPA)</p> <p>Orang tua sering kali meragukan kualitas dan keselamatan tempat penitipan anak meski fasilitasnya tersedia dan mudah diakses.</p> <p>TPA berbasis komunitas telah tersedia di Indonesia, tetapi belum diperluas untuk melayani lebih banyak provinsi. Selain itu, kualitas pelayanan juga harus dijamin.</p>	<p>Mempromosikan dialog terbuka untuk menghilangkan stigma negatif seputar TPA serta mengakui beragam keadaan dan preferensi keluarga.</p> <p>Menetapkan standar TPA untuk memberikan jaminan kualitas melalui penggabungan elemen-elemen dari pedoman <u>Daycare Ramah Anak</u> yang ada, sekaligus memenuhi kebutuhan pekerja informal.</p> <p>Standar tersebut harus mencakup struktur biaya yang terjangkau bagi pekerja informal. Bermitra dengan <u>serikat pekerja, pemerintah daerah, pengusaha, atau LSM</u> untuk membiayai layanan tersebut.</p> <p>Mempromosikan manfaat dan standar TPA untuk menanamkan kepercayaan pada orang tua dalam mendaftarkan anak mereka.</p> <p>Misalnya, <u>pusat penitipan anak berbasis komunitas di Vietnam</u> memberikan layanan tambahan seperti pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan dan mengurangi <i>stunting</i> di negara ini.</p>	<p><b>KemenPPPA, Kemensos, Kemendikbud, Kominfo:</b> Advokasi, penelitian, dan data</p> <p><b>Pemerintah daerah:</b> Pengawasan, sosialisasi, dan penyediaan data</p> <p><b>Akademisi dan organisasi penelitian:</b> Penelitian dan bimbingan teknis</p> <p><b>Serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil:</b> Pengawasan, advokasi, dan bimbingan teknis</p>	<p>Kerangka peraturan yang efisien</p> <p>Tawar-menawar kolektif</p> <p>Edukasi dan peningkatan kesadaran</p>	 <p>Tinggi</p>

# Rekomendasi dan peluang



Temuan 	Perubahan apa yang diperlukan? 	Aktor 	Kategori dan dampak 	Prioritas 
<p>Hanya 14% pekerja luring memiliki akses ke pengembangan bisnis dan mentor dibandingkan dengan 46% pekerja daring dan <i>hybrid</i>.</p> <p>Hanya 25% pekerja luring memiliki akses ke program pengembangan keterampilan dibandingkan dengan 58% pekerja daring dan <i>hybrid</i>.</p> <p>Hal ini menunjukkan bahwa memasukkan pekerja ke dalam lingkungan kerja daring dapat memberikan akses yang lebih baik untuk kemajuan bisnis dan karier mereka.</p>	<p>Mendorong pendekatan inklusif untuk meningkatkan akses pekerja luring ke pelatihan ulang dan sertifikasi dengan memanfaatkan inisiatif pemerintah yang sudah ada, seperti <u>Balai Latihan Kerja (BLK)</u></p> <p>Menyediakan pendekatan <i>hybrid</i> pada <u>program Kartu Pra-kerja</u> untuk meningkatkan inklusivitas. Pendekatan <i>hybrid</i> dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada perempuan yang mungkin tidak memiliki akses terhadap internet, telepon seluler, dan rekening bank. Hal ini akan membantu mengatasi <u>kesenjangan digital gender sebesar 13%</u> dalam kepemilikan telepon seluler di Indonesia</p> <p>Ada kebutuhan mendesak akan bantuan teknis untuk pendaftaran dan navigasi aplikasi/situs web agar pekerja perempuan informal dapat memenuhi syarat.</p>	<p>Kemeko Ekonomi, Kemaker, Kemenperin: Advokasi, penelitian dan data</p> <p>Pemerintah daerah: Pengawasan, sosialisasi, implementasi, dan penyediaan data</p> <p>Akademisi dan lembaga penelitian: Penelitian dan bantuan teknis</p> <p>Serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil: Pengawasan, advokasi, bantuan teknis</p>	<p>Kerangka peraturan yang efisien</p> <p>Edukasi dan peningkatan kesadaran</p>	 <p>Tinggi</p>

# Tujuan studi, area penelitian, dan target responden

## Rincian studi

### Fokus utama



Pendekatan penelitian kami melihat gambaran menyeluruh tentang perempuan dalam ekonomi informal dan menganalisis bagaimana digitalisasi memengaruhi produktivitas mereka.

### Tujuan utama



Studi ini bertujuan untuk memahami pengalaman, hambatan, tantangan, dan pendukung perempuan dalam ekonomi digital. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi strategi yang dapat mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan yang lebih besar.

### Area penelitian



Pertanyaan penelitian kunci berfokus pada:

1. Akses pekerja informal terhadap ekonomi digital;
2. Partisipasi perempuan dalam ekonomi digital dan tantangan yang dihadapi, seperti norma sosial, mobilitas, dan akses sumber daya;
3. Hambatan dan kendala sistemik dalam ekonomi digital;
4. Lingkungan yang mendukung untuk menciptakan peluang kerja yang inklusif.

## Provinsi studi

Studi dilakukan pada sembilan provinsi. Kami menggunakan Survei Angkatan Kerja Nasional ([Sakernas](#)) untuk mendapatkan distribusi data per provinsi dan klasifikasi daerah (urban/rural).

Jawa	Non Jawa
<ul style="list-style-type: none"><li>• Yogyakarta</li><li>• Jawa Timur</li><li>• DKI Jakarta</li><li>• Jawa Barat</li><li>• Banten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sumatera Utara</li><li>• Nusa Tenggara Barat</li><li>• Sulawesi Selatan</li><li>• Kalimantan Timur</li></ul>

## Jenis segmen pekerjaan

Kami merujuk definisi Sakernas untuk status pekerjaan dan mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori pekerjaan:

- Pekerja mandiri (pengemudi taksi daring dan pekerja lepas)
- Pekerja harian (porter perempuan, pekerja rumahan, pekerja lepas, dan pekerja domestik)
- UMKM dan pedagang kaki lima yang dipimpin perempuan



Penelitian ini mengumpulkan sudut pandang pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, penyedia platform, dan akademisi, untuk membangun pemahaman menyeluruh baik dari sisi penawaran maupun permintaan.



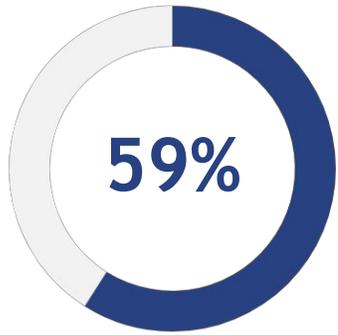
## Temuan dan hasil studi



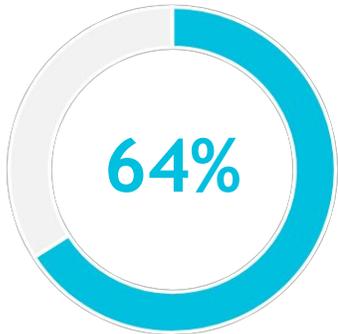
KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA



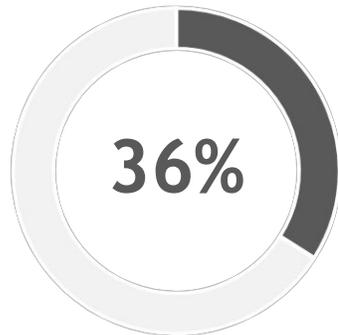
# Di Indonesia, perempuan mempunyai persentase pekerja informal tertinggi, meskipun partisipasi angkatan kerja mereka lebih rendah



pekerja di Indonesia bekerja di sektor informal. Jumlahnya mencapai 82,67 juta pekerja.



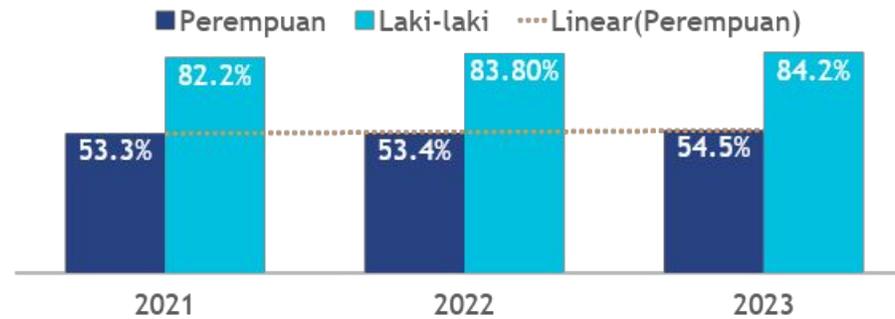
perempuan bekerja di sektor informal dibandingkan dengan 56% laki-laki.



perempuan bekerja di sektor formal dibandingkan dengan 44% laki-laki.

BPS, 2023; Cameron et al., 2018

Meskipun partisipasi angkatan kerja perempuan sedikit meningkat pada tahun 2023, kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terus melebar



Beberapa sektor menunjukkan ketidakseimbangan gender karena norma dan stereotip sosial mempengaruhi partisipasi. Perempuan mendominasi sektor:



Perdagangan besar dan eceran



Manufaktur dan produksi



Penyediaan akomodasi dan makan minum



Pendidikan



Kesehatan dan kegiatan sosial

Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja menunjukkan pola yang berulang



Terdapat hubungan berbentuk U antara partisipasi angkatan kerja perempuan dan status perkawinan, pendidikan, dan kekayaan.



Pada usia muda, semakin tinggi pendidikan seorang perempuan, semakin tinggi pula partisipasi kerjanya, tetapi pekerjaan rumah tangga menghambat partisipasinya.



Perempuan lajang dan berpendidikan tinggi tetap berada di pasar tenaga kerja pada usia 25 tahun dan terus berpartisipasi hingga mereka mendekati masa pensiun.



Sebaliknya, partisipasi kerja perempuan menikah dengan pendidikan rendah dan memiliki anak baru meningkat setelah usia 40 tahun.

# Perempuan cenderung lebih mudah untuk bekerja di sektor informal, tetapi pekerjaan daring membutuhkan persyaratan tambahan

- Sebanyak 95% perempuan pekerja menyatakan tidak ada syarat minimal pendidikan untuk bekerja di sektor informal
- Sekitar 88% responden menyebutkan bahwa mereka tidak perlu menyelesaikan pelatihan tertentu untuk melakukan pekerjaannya

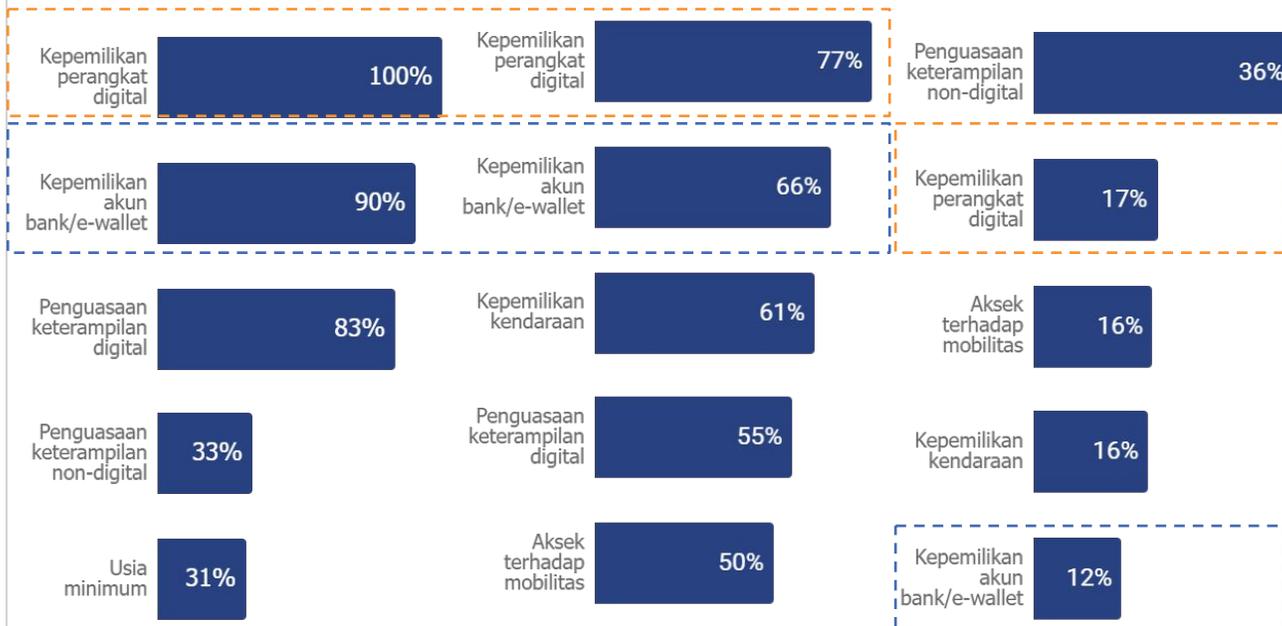
## Persyaratan masuk ke pekerjaan informal berdasarkan mode kerja

Responden diminta untuk memilih semua jawaban yang sesuai

Lima persyaratan pekerjaan teratas -daring sepenuhnya (N=42)

Lima persyaratan pekerjaan teratas -hybrid (N=193)

Lima persyaratan pekerjaan teratas -luring sepenuhnya (N=165)



## Persyaratan masuk berbeda-beda sesuai sifat pekerjaannya



Pekerja daring dan *hybrid* membutuhkan perangkat digital, diikuti dengan akun bank/e-wallet untuk menerima pembayaran nontunai, yang terintegrasi ke dalam platform. Hal ini mendukung argumen bahwa digitalisasi pekerjaan secara positif memengaruhi penggunaan produk dan layanan keuangan.

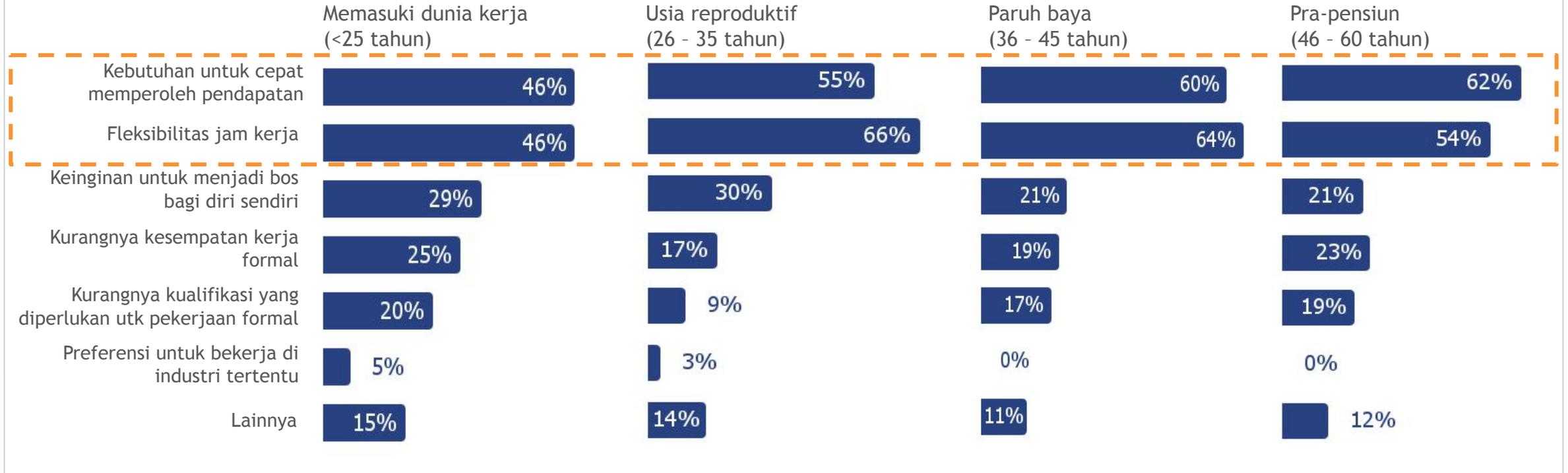


Bagi pekerja luring, penguasaan keterampilan tradisional merupakan hal yang berharga, tetapi tidak wajib sebelum memulai pekerjaan. Hal ini menyoroti peran pelatihan *on-the-job* yang umum terjadi dalam pekerjaan luring.

Tidak seperti pekerjaan daring, pekerjaan luring tidak membutuhkan akun bank/e-wallet karena sebagian besar transaksi menggunakan uang tunai.

# Fleksibilitas jam kerja dan kebutuhan untuk cepat memperoleh pendapatan menjadi motivasi utama perempuan untuk memasuki dunia kerja informal

Motivasi perempuan memasuki sektor informal berdasarkan kelompok usia (pertanyaan pilihan ganda, N = 400)

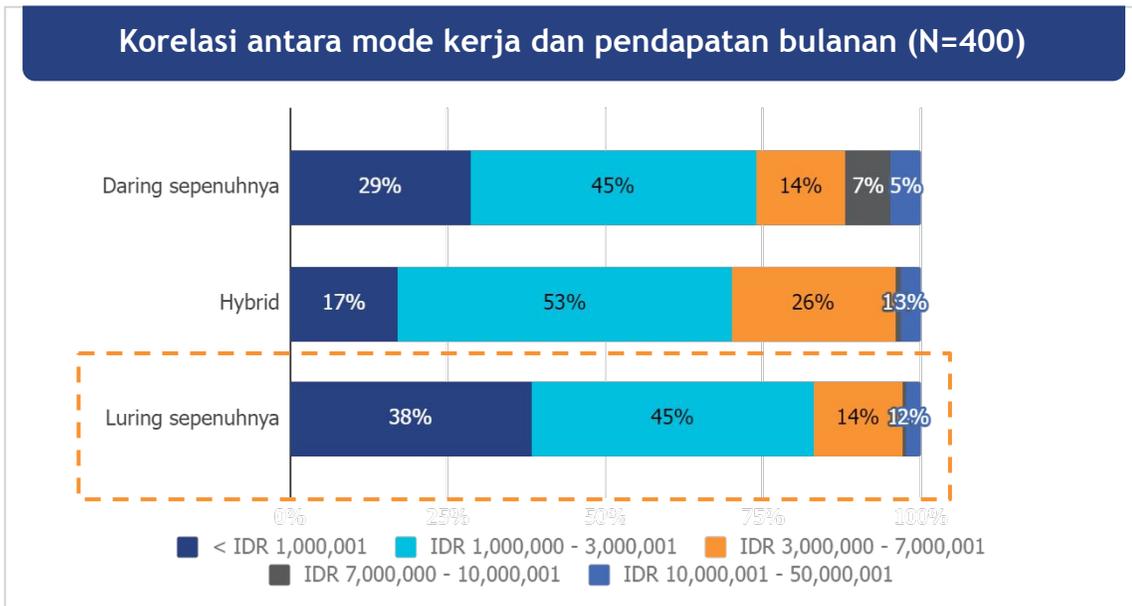


## Kerentanan usia tua

Setelah melewati usia reproduksi, perempuan terus tetap bekerja, didorong utamanya oleh kebutuhan untuk cepat memperoleh pendapatan. Situasi ini menekankan ketiadaan keamanan finansial pada pekerja informal. Kurangnya program pensiun dan dana pensiun yang dapat diakses dapat memperparah kerentanan pekerja informal di usia tua.

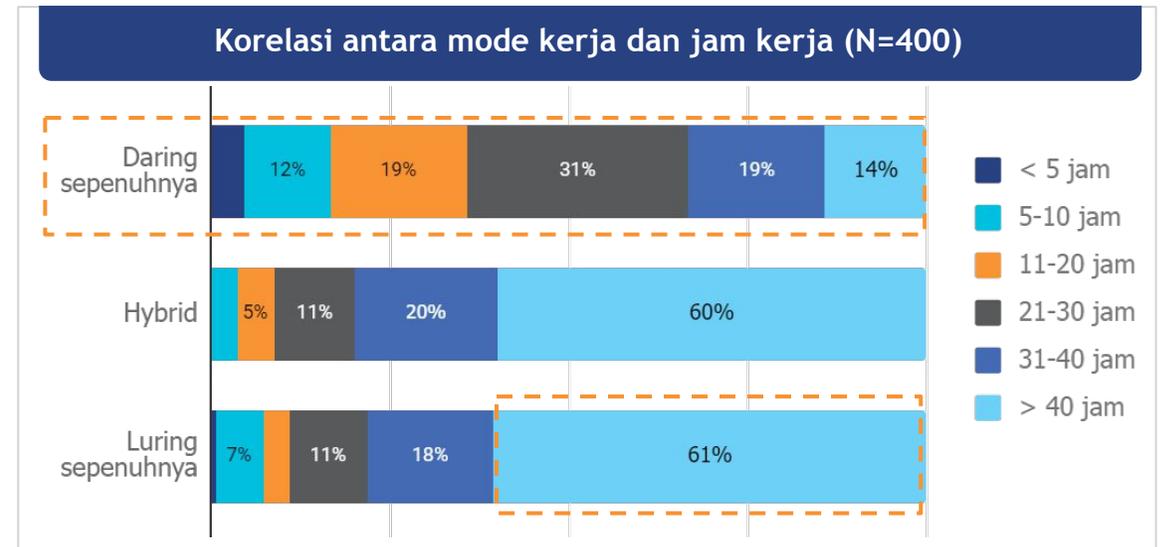
# Pekerja informal perempuan memiliki jam kerja yang lebih panjang dan pendapatan yang lebih rendah di seluruh mode kerja

- Kebanyakan pekerja informal biasanya memperoleh penghasilan lebih rendah dibandingkan pekerja formal.
- Sebagian besar responden, apa pun mode kerjanya, termasuk dalam kelompok berpenghasilan rendah dan kurang dari Rp 3 juta per bulan. Rata-rata upah minimum provinsi di Indonesia adalah Rp 3,1 juta.



- 01 Sebagian besar pekerja luring terkonsentrasi pada kelompok berpenghasilan rendah, diikuti oleh pekerja daring. (Modus = Rp 1-3 juta)
- 02 Ada lebih banyak pekerja *hybrid* (30%) yang dapat memperoleh penghasilan bulanan lebih dari Rp 3 juta dibandingkan dengan pekerja daring dan luring.

- 01 Mode kerja yang sepenuhnya daring memungkinkan distribusi jam kerja yang lebih seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi digital memungkinkan jam kerja yang fleksibel (Mode = 21-30 jam per minggu)
- 02 Perempuan yang bekerja sepenuhnya luring atau *hybrid* memiliki jam kerja lebih panjang, tetapi pendapatan mereka tidak lebih tinggi daripada pekerja daring (Modus = >40 jam per minggu).



# Aktivitas ekonomi perempuan dapat menjadi motor penggerak peningkatan akses dan penggunaan layanan perbankan

Namun, mode kerja (luring atau daring) juga berpengaruh pada preferensi responden terhadap layanan keuangan digital

**85%** pekerja informal perempuan memiliki *smartphone*.

**76%** pekerja informal perempuan memiliki akun bank. Sebagai perbandingan, hanya 63%\* perempuan Indonesia memiliki akun bank.

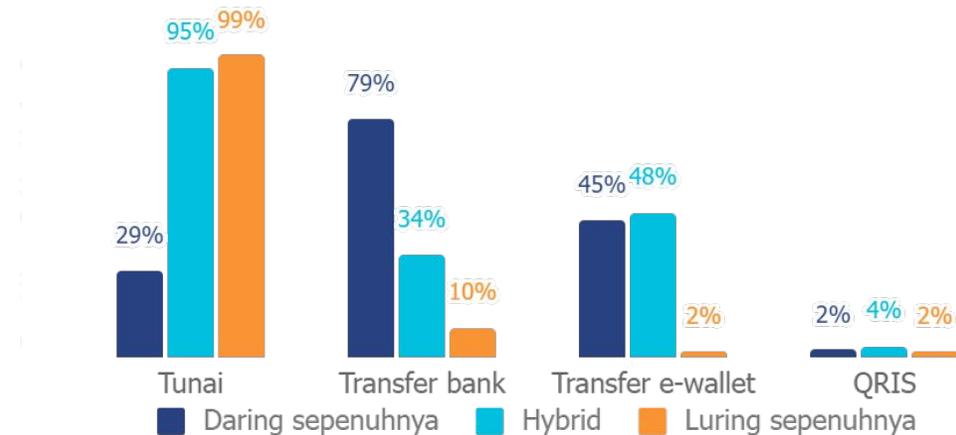
**56%** pekerja informal perempuan menggunakan *m-banking* atau *pembayaran digital*. Sementara itu, hanya 15%\* perempuan Indonesia melakukannya.

**52%** pekerja informal perempuan mulai menggunakan *m-banking* atau *pembayaran digital* karena tuntutan pekerjaan.

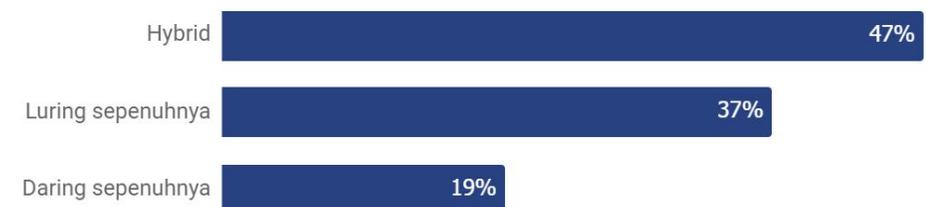
**90%** pekerja informal perempuan lebih memilih pembayaran *tunai*. Sementara itu, hanya 29% pekerja daring lebih memilih uang tunai.

\*Data Survei SNKI 2021

Preferensi produk keuangan berdasarkan mode kerja (n=400)



Akses terhadap kredit formal berdasarkan mode kerja (N= 400)



Perempuan pekerja daring memiliki kemungkinan paling kecil untuk mengakses pinjaman formal karena sistem penilaian kredit di bank dan koperasi masih dirancang berdasarkan pekerjaan luring.

# Secara umum, akses pekerja informal terhadap kredit masih rendah

Pekerja informal perempuan lebih banyak yang mengambil kredit formal dibanding kredit informal



**Akses ke kredit**

**40%** responden pernah mengambil kredit formal dengan rata-rata besaran sekitar Rp 3 juta sampai Rp 50 juta

**26%** responden pernah mengambil kredit informal dengan rata-rata besaran kurang dari Rp 3 juta

**66%** responden yang pernah mengambil kredit formal adalah pekerja *hybrid* dan daring

**56%** responden yang pernah mengambil kredit informal adalah pekerja *hybrid* dan daring



**Sumber kredit**

**Bank tetap menjadi sumber kredit formal pilihan di kalangan pekerja informal**

Kredit formal



**Keluarga dan teman merupakan pilihan paling populer untuk kredit informal, diikuti oleh kelompok tabungan**

Kredit informal




**Alasan mengambil kredit**

**Pekerja informal mengambil kredit formal untuk keperluan konsumsi dan produktif**



**44%** kebutuhan keluarga  
**28%** pembelian bahan mentah  
**19%** pembelian alat kerja

N = 160 responden, pertanyaan pilihan ganda

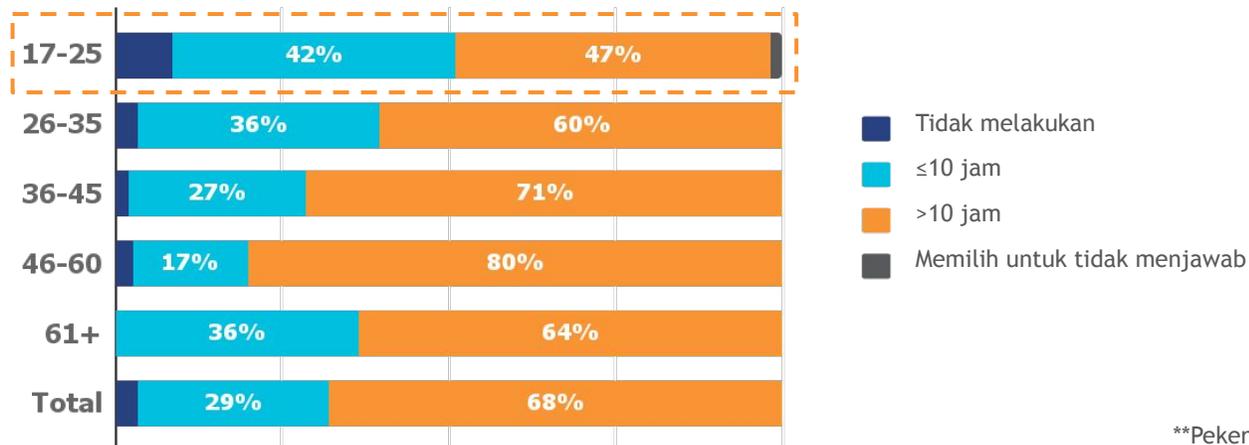
**Pekerja informal mengambil kredit informal terutama untuk tujuan konsumsi**



**67%** kebutuhan keluarga  
**14%** pembelian bahan mentah  
**5%** Uang DP untuk kendaraan

# Pekerja perempuan menghadapi beban ganda dari jam kerja yang panjang dan tanggung jawab perawatan tidak berbayar

Jam kerja perawatan tidak langsung\* dalam satu minggu berdasarkan kelompok usia (n=400)



\*Perawatan tidak langsung adalah pekerjaan perawatan yang tidak melibatkan kontak langsung dengan penerima perawatan, seperti memasak, membersihkan rumah, dan mencuci.

Perempuan mengambil tanggung jawab perawatan tidak langsung bahkan sebelum mereka membentuk keluarga mereka sendiri. Sekitar 47,5% perempuan berusia 17-25 tahun terlibat dalam pekerjaan perawatan tidak langsung selama lebih dari 10 jam per minggu. Mayoritas dari perempuan-perempuan ini belum menikah.

**Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak dianggap sebagai tanggung jawab perempuan yang menjadi alasan untuk mengesam-pingkan mereka dari dunia kerja.**

“

Menurut saya, tugas terpenting seorang ibu adalah merawat anak-anaknya. Peran suami adalah menyediakan kebutuhan keluarga, dan ibu seharusnya tinggal di rumah dan fokus pada perawatan.

- Seorang perias wajah lepas, Jawa Barat

“

Menurut saya, perempuan bertanggung jawab atas perawatan. Perempuan tahu segalanya dengan lebih baik, mulai dari makanan anak-anak hingga penyakit dan kebutuhan lainnya.

- Seorang pekerja platform, DKI Jakarta

Jam kerja perawatan langsung\*\* dalam satu minggu berdasarkan kelompok usia untuk kategori perempuan dengan tanggungan (n=287).



\*\*Pekerjaan perawatan langsung melibatkan kontak langsung dengan penerima perawatan, seperti menjaga anak, merawat orang sakit, dan perawatan lanjut usia. Catatan: Mohon interpretasikan data untuk kelompok usia 17-25 dan 61+ dengan hati-hati, karena kelompok usia ini memiliki ukuran sampel yang terbatas.

Tanggung jawab perawatan langsung lebih banyak ditemui di antara kelompok usia dengan tingkat fertilitas tertinggi secara nasional—yaitu kelompok usia 26-34 tahun. Ini menunjukkan bahwa memiliki anak meningkatkan tanggung jawab perawatan langsung bagi perempuan.

# Perempuan masih kesulitan untuk mengakses infrastruktur penitipan anak

Padahal, layanan penitipan anak memiliki potensi untuk mendorong partisipasi tenaga kerja perempuan.

59%

responden menyatakan bahwa mereka **tidak memiliki akses ke infrastruktur penitipan anak yang dapat diandalkan dan terjangkau.**<sup>1</sup>



Perempuan yang **belum menyelesaikan pendidikan dasar memiliki kemungkinan lebih rendah (8,6%) untuk mengakses fasilitas penitipan anak** dibandingkan dengan perempuan yang memiliki gelar universitas (51,3%). Perempuan yang belum menyelesaikan pendidikan dasar juga lebih sering mengambil tanggung jawab perawatan anak karena memiliki kekuatan tawar yang rendah dalam rumah tangga.



**Kurang dari separuh, atau 47% perempuan pada usia subur 26 - 35 tahun, memiliki akses ke fasilitas penitipan anak.** Penyediaan opsi penitipan anak untuk kelompok usia ini dapat membantu mengurangi hambatan dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab perawatan keluarga.



Perempuan dari **provinsi di luar Jawa memiliki akses lebih rendah ke fasilitas penitipan anak.** Provinsi di luar Jawa juga memiliki ketersediaan institusi perawatan dan pendidikan anak usia dini yang rendah.

<sup>1</sup>Infrastruktur penitipan anak yang disebutkan dalam kuesioner termasuk Taman Penitipan Anak (TPA), penitipan anak harian, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

98%

responden **tidak mengetahui adanya inisiatif pemerintah daerah ataupun pusat yang mendukung layanan penitipan anak untuk pekerja informal.**

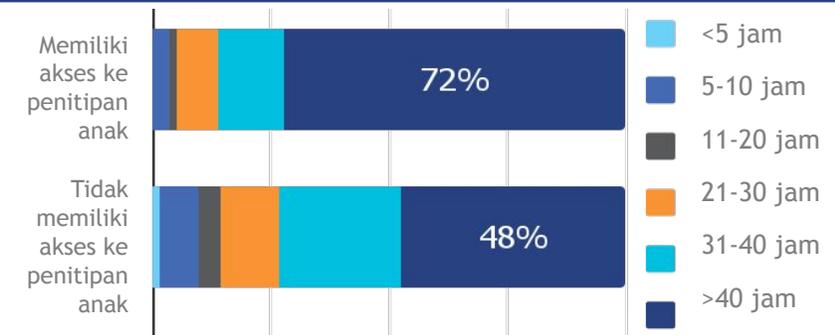
“

Berdasarkan pengamatan saya, tidak ada sosialisasi terkait fasilitas penitipan anak di desa saya ataupun masyarakat sekitarnya. Namun, mungkin jika pemerintah melakukannya, hal itu dapat membuka pikiran banyak orang sehingga mereka mengetahui banyak manfaat dari fasilitas penitipan anak.

- Pekerja rumahan, Sumatera Utara

Ibu dengan akses ke penitipan anak harian cenderung dapat bekerja lebih lama, karena mereka dapat mengurangi tanggung jawab perawatan keluarga tidak berbayar setiap harinya.

## Jam kerja berbayar mingguan berdasarkan akses ke fasilitas penitipan anak untuk perempuan dengan anak-anak (n=262)



# Akses terhadap peluang pengembangan bisnis dan pelatihan tersedia lebih besar bagi pekerja dengan mode pekerjaan daring dan *hybrid*

48%

dari responden tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan promosi dan kemajuan karier dikarenakan sifat pekerjaan mereka.

- Tanpa jalur karier yang jelas, pendapatan mereka hanya ditentukan oleh jumlah jam kerja. Hal ini memaksa pekerja informal untuk mengorbankan waktu pribadi dan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi untuk mendapatkan lebih banyak penghasilan.
- Akses ke pengembangan bisnis, promosi, dan pelatihan utamanya tersedia karena kebijakan afirmatif dari para pengusaha.

## Training of trainers

“Bergantung pada lamanya bekerja dan pengalaman, mitra kami diberi 'promosi' melalui insentif tambahan untuk melatih rekan-rekan kerja yang lebih baru.” - Seorang penyedia platform di Jakarta

## Pengembangan keterampilan dengan inisiatif sendiri

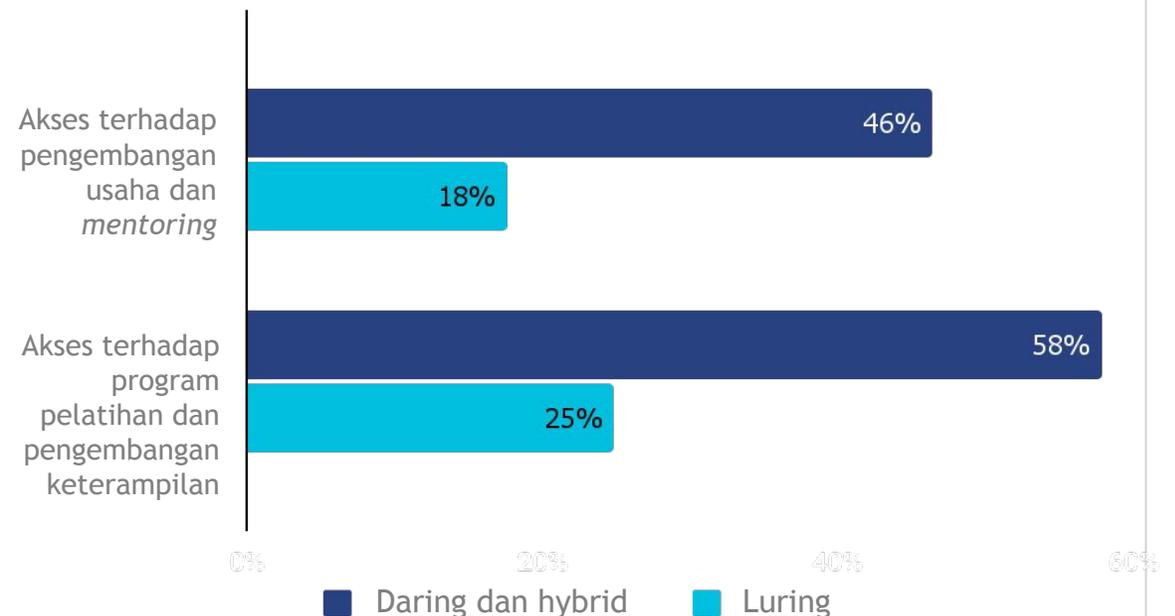
“Sebagai seorang perias, saya harus meningkatkan keterampilan saya mengikuti tren dan model terbaru. Saya bergabung dengan sebuah asosiasi untuk orang dengan disabilitas dan mengakses peluang pelatihan untuk melatih sebagai perias.” - Seorang pekerja lepas di Jawa Barat

## Kesenjangan akses pelatihan dan pengembangan keterampilan



- Akses ke pelatihan dan pengembangan keterampilan (*skilling and reskilling*) bervariasi secara signifikan tergantung tipe dan pengaturan pekerjaan informal responden.
- Pekerja informal daring dan *hybrid* umumnya menikmati akses pelatihan dan pengembangan keterampilan yang lebih besar.

## Akses pekerja ke pengembangan bisnis, *mentoring*, pelatihan, dan kesempatan pengembangan keterampilan (n=400)



# Sebagian besar pekerja informal perempuan tidak memiliki akses terhadap program perlindungan sosial

## Persentase pekerja informal perempuan tanpa perlindungan sosial (N=400)

**97%** dari pekerja informal perempuan tidak memiliki BPJS Kesehatan

**88%** dari pekerja informal perempuan tidak terdaftar di BPJamsostek

**98%** dari pekerja informal perempuan tidak mendapatkan hak maternitas atau akses layanan penitipan anak



Sekitar 35,6% dari sekitar 54,8 juta anggota BPJamsostek tidak aktif karena banyak pekerja informal sering kali pindah pekerjaan atau bahkan menjadi pengangguran yang menghambat kemampuan mereka untuk membayar iuran.

Source: Kementerian Ketenagakerjaan (2023)



**21%**

dari pekerja informal perempuan dalam studi ini terafiliasi dengan serikat pekerja

## Pekerja informal perempuan yang terafiliasi dengan persatuan pekerja memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan BPJamsostek. (n= 42)

Bukan anggota persatuan pekerja yang memiliki BPJamsostek

7%

Anggota persatuan pekerja yang memiliki BPJamsostek

34%

0 0.1 0.2 0.3 0.4

**Perundingan kolektif** (*collective bargaining*) melalui organisasi pekerja adalah langkah kunci untuk meningkatkan posisi pekerja informal dengan perusahaan mitra mereka, untuk dapat mengupayakan upah yang adil dan kondisi kerja yang lebih baik. Sumber: ILO

# Berkembangnya kemitraan berbasis *platform* digital menempatkan pekerja informal perempuan dalam kondisi kerja yang lebih tidak pasti



Model kemitraan berbasis platform digital secara pesat berkembang dari ekspansi startup dalam era ekonomi digital.



Model bisnis berbasis platform digital mengubah pekerjaan informal tradisional seperti pengemudi, kurir, pembersih, dan pembantu rumah tangga, ke dalam aplikasi/platform layanan berbasis teknologi.

Dalam ekonomi platform, perempuan bekerja dengan upah lebih rendah yang mengakibatkan mereka bekerja lebih lama untuk mendapatkan pendapatan yang sama dibandingkan dengan pekerja lainnya. Walaupun, pekerjaan informal berbasis platform digital memberikan berbagai manfaat lain, seperti jadwal kerja yang fleksibel.

Hal ini terutama terlihat pada pengemudi online perempuan

## Realitas pengemudi daring perempuan



**74%** dari pengemudi daring perempuan bekerja lebih dari 40 jam seminggu. Sebagai perbandingan, hanya 50% pekerja informal perempuan yang bekerja lebih dari 40 jam seminggu pada segmen lainnya.



**57%** dari pengemudi daring perempuan rata-rata menghasilkan Rp 1-3 juta per bulan.

*Klasifikasi pekerja sebagai mitra menghapus kewajiban penyedia platform untuk menyediakan perlindungan sosial kepada pekerja perempuan.*

## Model bisnis berbasis platform digital dapat menjadi tahap pertama menuju formalisasi pekerjaan

Munculnya pekerjaan berbasis platform digital mendorong munculnya regulasi yang mewajibkan pengemudi daring untuk menerima BPJS Kesehatan dan BPJamsostek.

Sayangnya, pengemudi online perempuan kurang perlindungan meskipun ada kecenderungan formalisasi



**67%** dari pengemudi daring perempuan dalam sample, tidak dilengkapi dengan BPJamsostek.



**97%** dari pengemudi daring perempuan dalam sample, tidak memiliki BPJS Kesehatan.



## Sampel dan metodologi



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA



# Sampel dan metodologi

## Tujuan utama studi

Studi ini bertujuan untuk memahami pengalaman, hambatan, dan faktor pendukung perempuan dalam ekonomi digital, serta mengidentifikasi strategi yang dapat mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan yang lebih besar.

## Metodologi dan jumlah responden

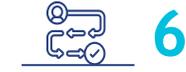
Kuantitatif



Kualitatif



Wawancara dengan pemangku kepentingan



## Karakteristik sampel kuantitatif

### Wilayah penelitian



Urban dan peri-urban:

Pusat kota dan daerah di desa/kelurahan yang tergolong sebagai perkotaan

76%



Rural:

Daerah di desa/kelurahan yang tergolong sebagai pedesaan

24%

### Daftar provinsi\*

- DKI Jakarta
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Kalimantan Timur
- Nusa Tenggara Barat
- Sulawesi Selatan
- Sumatera Utara
- Yogyakarta

### Usia responden

Kelompok umur	Persentase
17-25	15%
26-35	24%
36-45	28%
46-60	30%
>61	3%

### Gender dan kategori



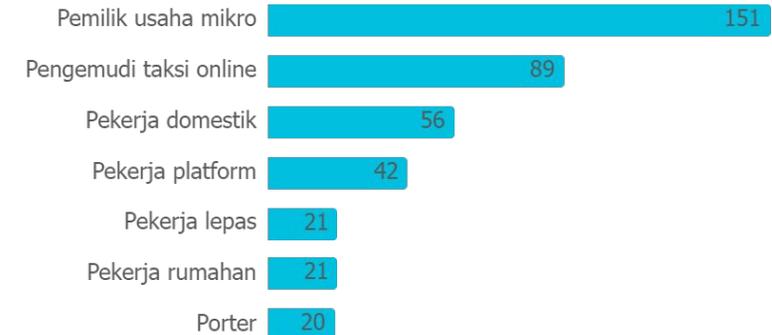
100%



Perempuan dengan disabilitas

5%

### Kategori pekerjaan



### Pendapatan bulanan individu (juta rupiah) (N=400)



\*Kami memetakan provinsi dengan konsentrasi pekerja informal tertinggi menggunakan data [Sakernas](#) (Survei Angkatan Kerja Nasional)

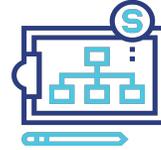
# MSC is recognized as the world's local expert in economic, social, and financial inclusion



International financial, social & economic inclusion consulting firm with **20+** years of experience



**180+** staff in **11** offices around the world



Projects in **~50** developing countries

## Our impact so far

**300+**  
clients

**>750**  
publications

Assisted development of digital G2P services used by **700 million+** people

Implemented **>750 DFS projects**

Developed **250+ FI products** and channels now used by **50 million+ people**

**Trained 8,000+** leading FI specialists globally

## Some of our partners and clients



# Sectors we work in

## Providing impact-oriented business consulting services

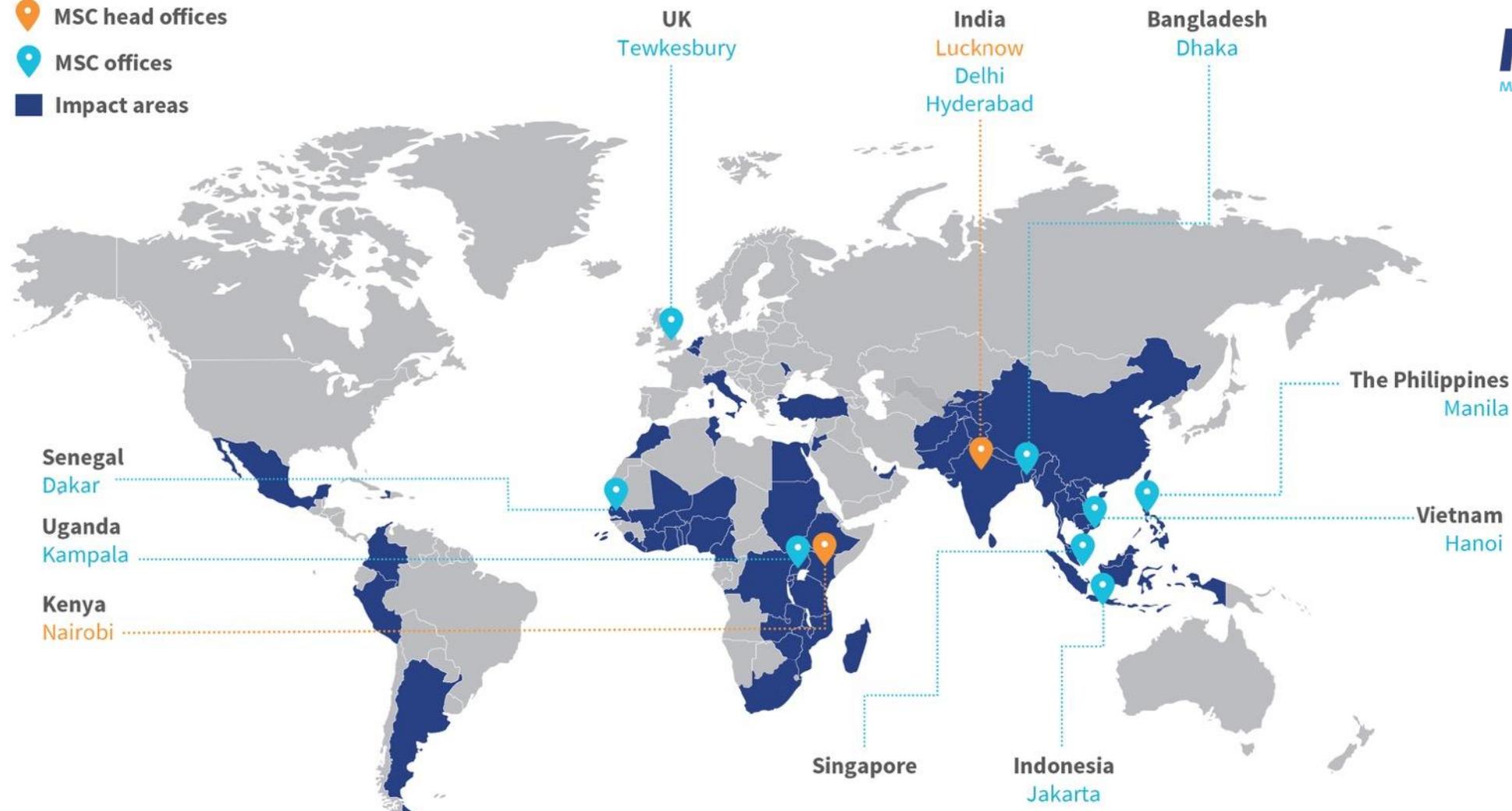
 <p><u>Banking, financial services, and insurance (BFSI)</u></p>	 <p><u>Water, sanitation, and hygiene (WASH)</u></p>	 <p><u>Government and regulators</u></p>	 <p><u>Micro, small, and medium enterprise (MSME)</u></p>	 <p><u>Social payments and refugees</u></p>		
 <p><u>Gender</u></p>	 <p><u>Education and skills</u></p>	 <p><u>Digital and FinTech</u></p>	 <p><u>Agriculture</u></p>	 <p><u>Youth</u></p>	 <p><u>Climate change and sustainability</u></p>	 <p><u>Health and nutrition</u></p>

# Multi-faceted expertise

## Advisory that helps you succeed in a rapidly evolving market

 <p><u>Policy and strategy</u></p>	 <p><u>Products and channels</u></p>	 <p><u>Research and analytics</u></p>	 <p><u>Organizational transformation</u></p>	 <p><u>Digital technology and channels</u></p>	 <p><u>Catalytic finance</u></p>
 <p><u>Design thinking and innovation</u></p>	 <p><u>Marketing and communication</u></p>	 <p><u>Training</u></p>	 <p><u>Government and regulations and policy</u></p>	 <p><u>Data Insight</u></p>	

-  MSC head offices
-  MSC offices
-  Impact areas



[MSC corporate brochure](#)

Contact us at [info@microsave.net](mailto:info@microsave.net)

### Asia head office

28/35, Ground Floor, Princeton Business Park,  
16 Ashok Marg, Lucknow, Uttar Pradesh 226001, India  
Tel: +91-522-228-8783 | Fax: +91-522-406-3773 | Email: [manoj@microsave.net](mailto:manoj@microsave.net)

### Africa head office

Landmark Plaza, 5<sup>th</sup> Floor, Argwings Kodhek Road  
P.O. Box 76436, Yaya 00508, Nairobi, Kenya  
Tel: +254-20-272-4801/272-4806 | Email: [anup@microsave.net](mailto:anup@microsave.net)